



FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMAKAIAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI KECAMATAN BAJAWA

FACTORS INFLUENCING MAKERS IN LONG ACTING REVERSIBLE CONTRACEPTIVES IN BAJAWA SUB DISTRICT

 *Agustina Yasinta Yami¹, Gadis Meinar Sari², Atika³*

¹Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

²Departemen Faal Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

³Departemen IKM Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Email : agustinayam@gmail.com

ABSTRAK

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang dianjurkan pemerintah karena memberi perlindungan jangka panjang dan efektifitasnya tinggi dengan angka kegagalan sebesar 0,5 sampai 2 kehamilan / 100 perempuan pada tahun pertama penggunaan. Pemakaian kontrasepsi jangka panjang dipengaruhi oleh peran petugas dan pengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara peran petugas kesehatan dan pengambil keputusan dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan rancang bangun *Crosssectional*. Besar sampel 92 responden dengan teknik pengambilan sampel *consecutive sampling*. Variabel independen nya yaitu peran petugas kesehatan dan pengambil keputusan, sedangkan variabel dependen yaitu pemakaian MKJP. Uji analisis bivariat menggunakan uji *chi square* dan *Fisher's Exact*. Hasil penelitian menunjukkan pemakaian kontrasepsi yang terbanyak adalah non MKJP. Hasil analisis *chi square* didapatkan nilai $p < 0,05$ dinyatakan peran tenaga kesehatan berhubungan dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang (0,017). Hasil analisis *Fisher's Exact* diperoleh nilai $p > 0,05$ menyatakan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengambil keputusan dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (0,793). Dapat disimpulkan bahwa peran tenaga kesehatan berhubungan dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang sedangkan pengambil keputusan tidak berhubungan dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang.

Kata kunci : peran petugas kesehatan, pengambil keputusan dan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang.

ABSTRACT

*Long-Acting Reversible Contraceptives (LARCs) is a contraceptive method recommended by the government which has long-term protection and high effectiveness with a failure rate of 0.5 to 2 pregnancies / 100 women in the first year of usage. The use of LARCs are influencing by the role of health officers and decision-makers. This study aimed to analyze relationship between the role of health officers and decision-makers with the use of LARCs. Methode used is an observational analytic study using a cross-sectional approach. with 92 samples respondents. The technique used in sampling was consecutive sampling. The independent variables were the role of health officer and decision-makers while , the dependent variable was LARCs usage. The bivariate analysis test used the chi-square test and fisher's exact. The Result shows the most common of contraceptive usage was non-LARCs. The results of chi-square analysis showed p-value < 0.05 stated statistically associated between the role of health officers and LARCs usage (0.017). In contrast, the result of fisher's exact analysis showed p-value $> 0,05$ stated non statistically associated between decision makers and LARCs usage (0,793). **Conclusions:** Concluded that the role of health officers associated with LARCs while decision makers aren't associated with LARCs usage.*

Keywords: *The role of health officers, decision-makers and LARCs usage*

e-ISSN 2656-7806 © 2020



Published by Universitas Airlangga. This is an **Open Access (OA)** article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

DOI: 10.20473/imhsj.v4i2.2020.129-136



PENDAHULUAN

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi (Hartanto, 2015). Berdasarkan efektifitasnya metode kontrasepsi dibagi menjadi dua yaitu metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan non metode kontrasepsi jangka panjang (non MKJP). MKJP merupakan metode kontrasepsi yang dianjurkan pemerintah karena memberi perlindungan jangka panjang dan efektifitasnya tinggi dengan angka kegagalan sebesar 0,5 sampai 2 kehamilan / 100 perempuan pada tahun pertama penggunaan sedangkan non MKJP sebesar 4 sampai 29 kehamilan / 100 perempuan per tahun.

Pencapaian MKJP secara nasional pada tahun 2017 sebesar 17,46% dan meningkat 0,11% tahun 2018 sebesar 17,57 %. Pencapaian MKJP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dan 2018 hasilnya sama yaitu sebesar 31% (BKKBN, 2018). Pencapaian MKJP Kecamatan Bajawa tahun 2017 sebesar 57,2% dan menurun menjadi 38% pada tahun 2018, dari target yang ditentukan 46,48%.

Petugas Kesehatan dalam hal ini bidan menjadi promotor utama dalam meningkatkan pemakaian kontrasepsi sebagai preventif terutama bagi wanita dengan 4T, (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak). Pemakaian kontrasepsi merupakan tanggungjawab pasangan usia subur (PUS) dalam kesehatan reproduksi terutama untuk kelangsungan hidup ibu dan anak. Keputusan pemakaian kontrasepsi terkadang dilakukan sendiri tanpa melibatkan pasangan bahkan masih dipengaruhi oleh orang tua ataupun mertua.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan menganalisis hubungan antara peran petugas kesehatan dan pengambil keputusan dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada akseptor Keluarga Berencana di Kecamatan Bajawa. Manfaat penelitian ini adalah dapat memperhatikan hal – hal yang berhubungan dengan pemakaian metode kontrasepsi, penyuluhan serta konseling informasi dan edukasi (KIE) dalam pelayanan keluarga berencana. Capaian peserta Keluarga Berencana aktif sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami fluktuasi setiap tahun. Program KB mempunyai peran yang strategis dalam upaya penanggulangan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, pendewasaan

usia perkawinan, dan pembinaan ketahanan serta peningkatan kesejahteraan keluarga (BKKBN, 2018).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik observasional, dengan pendekatan *crosssectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan akseptor Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sampel uji hipotesis beda 2 proporsi dengan besar sampel minimal 92. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 177 dan teknik pengambilan sampel adalah *nonprobability sampling* yaitu *consecutive sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari register KB yang ada di puskesmas wilayah Kecamatan Bajawa. Teknik pengolahan data editing, coding, scoring, data entry, verifikasi, output computer. Analisis data dengan analisis univariat dan bivariat. Analisis bivariat menggunakan uji chi square dan fisher exact.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Peran Petugas Kesehatan dan Pengambilan Keputusan

Kategori	N	%
Peran Petugas Kesehatan		
a. Kurang	120	67,8
b. Baik	57	32,2
Total	177	100
Pengambil Keputusan		
a. Suami	31	17,5
b. Istri	12	6,8
c. Musyawarah suami dan istri	128	72,3
d. Orang Tua/ Mertua/Menantu	6	3,4
Total	177	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor KB di Kecamatan Bajawa berpendapat bahwa peran petugas kesehatan masih kurang untuk membantu akseptor dalam pemakaian kontrasepsi (67,8%) serta pengambil keputusan dalam penggunaan kontrasepsi sebagian besar merupakan keputusan bersama melalui musyawarah antara suami dan istri (72,3%).

Tabel 2. Hubungan antara peran petugas kesehatan dengan penggunaa metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Peran Petugas Kesehatan	Penggunaan MKJP						Nilai p.	PR (95%CI)
	Non MKJP		MKJP		Total			
	N	%	N	%	N	%		
Kurang	79	65,8	41	34,2	120	100	0,017	1.443
Baik	26	45,6	31	54,4	57	100		1.057–1.971
Total	105	59,3	72	40,7	177	100		

Berdasarkan tabel di atas terdapat 79 akseptor KB (65,8%) yang kurang mendapat peran tenaga kesehatan lebih memilih menggunakan non MKJP dan 31 akseptor KB (54,4%) yang mendapat peran yang baik dari tenaga kesehatan menggunakan MKJP. Hasil analisis statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p < 0,05$ menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara peran tenaga kesehatan dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di Kecamatan Bajawa tahun 2019. Prevelens Rasio yang diperoleh dari uji statistik adalah 1,443 yang berarti akseptor KB yang mendapat peran tenaga kesehatan yang kurang, berisiko memilih non MKJP 1,443 kali lebih besar dari peran tenaga kesehatan yang baik. *Contingency coefficient* 0,189 yang diperoleh dari uji statistik, ini menunjukkan bahwa tingkat kekuatan hubungan antara peran petugas kesehatan dengan penggunaan MKJP sebesar 0,189 atau lemah.

Tabel 3. Hubungan antara pengambil keputusan dengan penggunaa metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Pengambil Keputusan	Penggunaan MKJP						Nilai p.
	Non MKJP		MKJP		Total		
	N	%	N	%	N	%	
Suami	16	51,6	15	48,4	31	100	0,793
Istri	7	58,3	5	41,7	12	100	
Musyawahar suami dan istri	78	60,9	50	39,1	128	100	
Orang Tua/Mertua	4	66,7	2	33,3	6	100	
Total	105	59,3	72	40,7	177	100	

Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 akseptor KB (66,7%) yang pengambil keputusan oleh orang tua / mertua dan 78 akseptor KB (60,9%) yang pengambil keputusan melalui musyawarah suami dan istri lebih memilih menggunakan non MKJP. Hasil analisis statistik dengan uji *Fisher's Exact* diperoleh nilai $p > 0,05$ menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pengambil keputusan dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di Kecamatan Bajawa tahun 2019.

Petugas kesehatan berperan dalam memberikan informasi, penyuluhan dan menjelaskan tentang alat kontrasepsi beserta kelebihan dan kekurangan terutama mengenai MKJP sehingga membuat akseptor KB lebih tertarik untuk memakai MKJP. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar akseptor KB kurang mendapat peran dari tenaga kesehatan (67,8%) dan hampir setengah mendapat peran baik dari petugas kesehatan (32,2%). Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan bermakna antara peran petugas kesehatan dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang dan prevalens Rasio (PR) adalah 1,443 yang berarti akseptor KB yang mendapat peran kurang dari tenaga kesehatan cenderung memakai non MKJP 1,443 kali lebih besar dari akseptor KB yang mendapat peran baik dari tenaga kesehatan. Diperoleh 79 akseptor KB yang mendapat peran kurang dari tenaga kesehatan (65,8%) lebih memilih memakai non MKJP dan 31 akseptor KB yang mendapat peran baik dari tenaga kesehatan (54,4%) memilih memakai MKJP. Peran tenaga kesehatan yang kurang tentang MKJP dapat dilihat berdasarkan jawaban pertanyaan tentang penggunaan ABPK saat konseling. Dari hasil tersebut hampir setengah akseptor KB mengatakan petugas kesehatan tidak menggunakan ABPK saat melakukan konseling kontrasepsi. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peran tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan dan konseling sangat berarti, hal ini dapat dilakukan diberbagai kesempatan pertemuan antara akseptor dengan petugas kesehatan. Titik berat konseling adalah meningkatkan kemampuan calon akseptor untuk dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan MKJP yang dipakai (BKKBN, 2018). Kompetensi tenaga yang memberikan pelayanan KB merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan KB, sehingga perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten, karena merupakan sumber informasi yang tepat bagi masyarakat tentang kontrasepsi (Triyanto, L., & Indriani, D., 2018). Peran tenaga kesehatan di Kecamatan Bajawa telah banyak dilakukan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran serta keikutsertaan dalam penggunaan MKJP. Berbagai hal yang telah dilakukan diantaranya dengan memberikan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi wanita dan Keluarga Berencana dengan penayangan video kesehatan reproduksi dan Keluarga berencana serta penyuluhan yang diselenggarakan atas kerjasama BKKBN, Dinas Kesehatan serta sector terkait sekali setahun di desa – desa. Akan tetap pelaksanaan kegiatan ini belum merata di semua desa di Kecamatan Bajawa. Kegiatan lainnya yang telah dilakukan



adalah pelayanan pemasangan MKJP secara masal di desa – desa dan fasilitas kesehatan serta pemantauan berkala oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam pelayanan kontrasepsi yaitu dengan memberi pelayanan berupa pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim dan pemasangan alat kontrasepsi bawah kulit.

Penggunaan alat bantu pengambil keputusan (ABPK) oleh tenaga kesehatan dapat meningkatkan keterlibatan akseptor KB dan pasangan dalam menentukan metode kontrasepsi yang dipakai. Jumlah petugas kesehatan yang ada di Kecamatan Bajawa sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, rata – rata di setiap desa memiliki satu petugas kesehatan (bidan). Pengalaman akseptor KB menunjukkan bahwa petugas kesehatan sering melakukan penyuluhan dan konseling tentang kontrasepsi namun jarang menggunakan alat bantu pengambil keputusan sehingga membuat mereka menganggap informasi yang disampaikan belum jelas. Hal ini membuat responden kurang memahami dan kurang minat terhadap MKJP. Petugas kesehatan telah memberikan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kontrasepsi kepada calon pengantin, ibu hamil dan pasangan saat kunjungan kehamilan trimester ketiga, setelah melahirkan atau masa nifas dan saat kunjungan ulang akseptor KB. Petugas kesehatan menyampaikan semua metode kontrasepsi jangka panjang, tujuan, cara kerja, keuntungan, kerugian, efek samping dan kemungkinan kegagalan setiap metode kontrasepsi jangka panjang dengan menggunakan alat bantu pengambil keputusan, leaflet, buku kesehatan ibu dan anak, poster KB dan alat peraga kontrasepsi (Tibaijuka, L. et al., 2017). Tenaga kesehatan selalu memberikan kesempatan kepada pasangan usia subur untuk menentukan sendiri alat kontrasepsi yang akan digunakan. Untuk meningkatkan minat dan informasi yang lengkap akan kebutuhan MKJP maka perlu adanya kesediaan waktu serta informasi, komunikasi dan edukasi yang akurat oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan media penyuluhan, teknik komunikasi yang baik serta keterampilan dalam melakukan konseling dan pendidikan kesehatan.

Pengambilan keputusan dalam penggunaan kontrasepsi merupakan hal penting dalam menentukan metode kontrasepsi yang dipakai oleh karenanya informasi yang diperoleh baik dari petugas kesehatan maupun dari lingkungan masyarakat dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan menggunakan metode kontrasepsi. Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruh akseptor KB pengambil keputusan

menggunakan metode kontrasepsi melalui musyawarah suami dan istri (72,3%), dan sebagian kecil (17,5%) merupakan keputusan suami dan diri sendiri (6,8%), oleh orang tua/mertua (3,4%). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan bermakna antara pengambil keputusan dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Terdapat 66,7% pengambil keputusan oleh orang tua/ mertua dan 60,9% melalui musyawarah suami dan istri yang memilih penggunaan non MKJP. 48,4 % pengambil keputusan oleh suami dan 41,7 % oleh diri sendiri yang memilih menggunakan MKJP. Pengambilan keputusan oleh orang tua/mertua dan melalui musyawarah suami dan istri paling dominan dalam penelitian ini. Keputusan oleh orang tua/mertua dipengaruhi oleh informasi dan pengalaman positif yang diperolehnya tentang MKJP. Keputusan melalui musyawarah sama – sama memberi pengaruh baik terhadap penggunaan MKJP maupun non MKJP. Hal ini menunjukkan bahwa baik akseptor yang memilih menggunakan MKJP ataupun non MKJP sebagian besar melalui keputusan bersama pasangan usia subur. Sebagai patner dalam penggunaan kontrasepsi, pasangan suami istri merasakan pengaruh dari kontrasepsi yang digunakan, oleh karenanya perlu keterlibatan pasangan dalam penyuluhan, konseling, komunikasi, informasi dan edukasi tentang metode kontrasepsi jangka panjang dengan menggunakan media penyuluhan maupun alat bantu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang di lebih efektif dan akurat tentang kontrasepsi yang akan membantu pasangan usia subur dalam pemakaian MKJP.

KESIMPULAN

Peran petugas kesehatan berhubungan dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang dan pengambil keputusan tidak berhubungan dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor lain yang diduga berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, B.(2014) *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Arifiana, R., Budihastuti, U. R., & Qadrijati, I. (2018). Biopsychosocial Determinants of Long-term Contraceptive Use in Women of Reproductive Age in Surakarta, Central Java. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 03(01), 37–47. <https://doi.org/10.26911/thejhpb.2018.03.01.04>



- Belay, L., & Birara, M. (2018). Factors affecting long-term and permanent contraceptive uptake among post-partum mothers at a hospital in Addis Ababa, Ethiopia: a cross-sectional study. *The Lancet Global Health*, 6, S34. [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(18\)30163-3](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(18)30163-3)
- BKKBN. (2016) *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional* tentang Rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019.
- BKKBN. (2017). *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional no 14* tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi.
- BKKBN. (2018). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017*.
- BKKBN. (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2018*.
- Curtis, K. M., & Peipert, J. F. (2017). Long-Acting Reversible Contraception. *New England Journal of Medicine*, 376(5), 461–468. <https://doi.org/10.1056/NEJMcpl608736>
- Mahmudah, L. & Indrawati, F. (2015). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) Pada Akseptor Kb Wanita Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. *Unnes Journal of Public Health.*, 4(3), 76–85. <https://doi.org/10.15294/ujph.v4i3.7222>
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 2018 Tentang *Jaminan Kesehatan*.
- Suratun, 2008 *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : Trans Info Media
- Tibaijuka, L., Odongo, R., Welikhe, E., Mukisa, W., Kugonza, L., Busingye, I., ... Bajunirwe, F. (2017). Factors influencing use of long-acting versus short-acting contraceptive methods among reproductive-age women in a resource-limited setting. *BMC Women's Health*, 17(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12905-017-0382-2>
- Triyanto, L., & Indriani, D. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Wanita Menikah Usia Subur di Provinsi Jawa Timur. *The Indonesian Journal of Public Health*, 13(2)(April), 244–255. <https://doi.org/10.20473/ijph.v113il.2018.244-255>